

Catatan Hasil ReviuST No : 443/BP/ST/XI/2013

dicantumkan dalam Neracadan diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Namun demikian, Aset Tetap rusak berat dan/atau usang tersebut agar dicantumkan dalam Daftar Barang Rusak Berat dan/atau Usang.

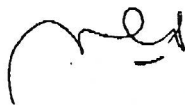
Terhadap Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan aset dalam kondisi rusak berat dan/atau usang dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya tidak dilakukan penyusutan.

3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan (PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II.02 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.1: Penyajian Laporan Keuangan). Koordinasikan dengan KPKNL setempat terkait BMN yang nilainya tidak wajar.
4. CaLK disajikan secara sistematis, setiap pos dalam LRA dan Neraca harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA dan Neraca. (Par 105 & 106, PP71/2010);

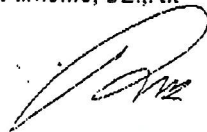
Jambi, 20 November 2013

Tim Reviu
Bawas MA RI

Penanggungjawab UAPPA-W 01 Jambi



1. Imam Purnomo, SE.,Ak



2. Rama Rahim, SE, MM, MBA.



3. Sagimin,SH, MM.



Mawanto, SH, MH.

Catatan Hasil ReviuST No : 443/BP/ST/XI/2013

1. Masih terdapat satker belum menetapkan estimasi pendapatan PTUN Bengkulu KKR.05.1

b. NERACA UAKPA/UAPPA-W 01

No	Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR
1.	Saldo persediaan pada SIMAK BMN PA Sengeti dan PA Kuala Tungkal per 30 Juni 2013 berbeda antara data sebelum Monev oleh BUA dengan data sesudah Monev oleh BUA yaitu pada PA Sengeti, PA Kuala Tungkal, PA Sungai Penuh, PTUN Jambi.	KKR.05.1
2.	Terdapat aset berupa meja kerja kayu dsb sebesar Rp. 82.385.723 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berasal dari belanja barang (52111), agar diungkap dalam CaLK.	KKR.05.1
3.	terdapat kesalahan pencatatan belanja modal peralatan dan mesin pada PA sungai Penuh, atas belanja modal tersebut diinput dalam SIMAK BMN hanya diinput dalam 1 barang berupa peralatan komputer lainnya sebesar 46.000.000 dan terdapat belanja modal peralatan dan mesin PA sungai Penuh sebesar 54.000.000, atas belanja modal tersebut diinput dalam SIMAK BMN hanya diinput dalam 1 barang berupa meubelair lainnya sebesar 54.000.000 seharusnya atas pembelian tersebut diinput sesuai dengan jenis barangnya.	KKR.05.1
4.	Terdapat pekerjaan penggantian keramik biasa menjadi keramik sekelas granit pada PT Jambi, diperkirakan nilai pekerjaan tersebut melebihi batas kapitalisasi sebesar 10.000.000, pekerjaan tersebut menggunakan biaya pemeliharaan. Karena pekerjaan tersebut menambah kualitas dan melebihi nilai kapitalisasi maka seharusnya atas pekerjaan tersebut menambah nilai bangunan tersebut.	KKR.05.1
5.	Terdapat kesalahan pencatatan atas belanja modal peralatan dan mesin pada PA Sengeti. 5 buah printer diinput masing-masing @ 76.000, seharusnya nilai printer per unit 760.000 dan sudah dilakukan perbaikan.	KKR.05.1
6.	Terdapat kesalahan pencatatan gedung kantor milik PN Muara Bulian. PN Muara Bulian hanya memiliki 1 gedung kantor tetapi dalam SIMAK BMN gedung tersebut dicatat dalam 6 NUP (NUP 1 sd 6).	KKR.05.1

c. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR
• Belum memutakhirkan peraturan terkait Undang-Undang APBN Perubahan Tahun 2013 menjadi UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 19 Tahun 2012; • Terdapat satker yang belum mengungkapkan Pengungkapan Uang Titipan Pihak Ketiga ke dalam CaLK pada Laporan Keuangan Semester I TA 2103 untuk DIPA 03 yaitu pada Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Muara Bungo, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Negeri Bangko.	

Catatan Hasil ReviuST No : 443/BP/ST/XI/2013

- Terdapat satker yang belum mengungkapkan Uang Titipan Pihak Ketiga ke dalam CaLK pada Laporan Keuangan Semester I TA 2103 untuk DIPA 04 yaitu pada PA Sengeti, PA Sarolangun, PA Bangko
- Terdapat satker yang belum mengungkapkan Uang Titipan Pihak Ketiga ke dalam CaLK pada Laporan Keuangan Semester I TA 2103 untuk DIPA 05 yaitu PTUN Jambi.
 - Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Satker diwajibkan menyajikan Akumulasi Penyusutan yang merupakan pengurang nilai pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos Diinvestasikan dalam Aset Tetap pada Neraca. Informasi tersebut diungkapkan juga dalam CaLK yang sekurang-kurangnya memuat : **nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.** Sebagian besar satker belum menjelaskan akumulasi penyusutan pada penjelasan atas pos-pos neraca;
 - CaLK belum sepenuhnya dibuat secara cermat dan teliti, masih terdapat kesalahan penulisan angka-angka serta belum mengungkapkan informasi substantif dan relevan khususnya atas perkiraan (akun) yang disajikan dalam LRA dan Neraca.

III. KOREKSI/PERBAIKAN YANG AKAN DILAKUKAN/DISETUJUI

No

Uraian Catatan Hasil Reviu

1. Atas penetapan Kode MAK/MAP baik pada dokumen perencanaan maupun dokumen pelaksanaan anggaran perlu memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar. Satker yang memiliki jasa giro yang berasal dari rekening perkara sesuai Surat Sekretaris MA RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui kode MAP 423419. Atas pendapatan yang bukan merupakan jenis PNBK MA RI (PP No.53 Tahun 2008), perlu segera dikoreksi pada KPPN setempat dengan memperhatikan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan kepos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (**Bultek 09 tentang Akuntansi Aset Tetap**).
Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya, agar tidak dicantumkan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Namun demikian, Aset Tetap yang hilang tersebut agar dicantumkan dalam **Daftar Barang Hilang**.
Segera lakukan reklasifikasi asset dalam kondisi rusak berat dan/atau usang serta usulkan penghapusannya. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang tersebut agar tidak

Catatan Hasil ReviuST No : 443/BP/ST/XI/2013

2. Terdapat PNBPN berupa Pendapatan Jasa Keuangan (Jasa Giro) yang seharusnya KKR.01.2
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (423419) yaitu pada Pengadilan
Negeri Tanjung Jabung Timur
3. Terdapat PNBPN berupa Pendapatan Jasa Keuangan (Jasa Giro) yang merupakan KKR.01.3
jasa giro berasal dari rekening DIPA 03 dimasukkan ke dalam PNBPN DIPA 01
pada Pengadilan Negeri Muara Bungo
4. Terdapat realisasi pendapatan dengan kode MAP 423221 (Pendapatan Jasa KKR.01.4
Lembaga Keuangan/Jasa Giro) sebesar Rp31.728,- pada PN Bengkulu; PNBPN
berupa Pendapatan Anggaran Lain-Lain (423999) pada Pengadilan Negeri
Muara Bungo, Pengadilan Negeri Muara Tebo, Pengadilan Negeri Muara
Bulian, Pengadilan Agama Muara Sahak, Pengadilan Agama Muara Tebo,
Pengadilan Agama Muara Bungo, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
yang seharusnya disesuaikan dengan jenis penerimaannya.
5. Terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset berupa
jaringan lainnya (pemasangan speedy) sebesar Rp511.500 pada PN Muara
Bulian, agar dijelaskan dalam CaLK.
6. Terdapat belanja modal jaringan yang membentuk aset berupa penambahan nilai
gedung dan bangunan (penambahan daya listrik) sebesar 24.970.000 pada PA
Muara Tebo, agar dijelaskan dalam CaLK.

UAPPA-W 03 PN JAMBI

No	Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR
1.	Terdapat PNBPN berupa Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dengan total sebesar Rp. 448.880,- pada Semester I tahun 2013 di Pengadilan Negeri Muara Bungo	KKR.03.1
2.	Terdapat Terdapat PNBPN berupa Pendapatan Hasil Denda / Tilang dan Sebagainya (423414) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Tanjung Jabung Timur.	KKR.03.2
3	Seluruh satker belum membuat estimasi pendapatan kecuali Pengadilan Negeri Muara Bongo.	KKR.03.3

UAPPA-W 04 PTA JAMBI

No	Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR
1.	Seluruh satker belum menetapkan estimasi pendapatan	KKR.04.1

UAPPA-W 05 PTUN JAMBI

No	Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR
----	----------------------------	---------------

Catatan Hasil ReviuST No : 443/BP/ST/XI/2013



bagian keuangan
dan umum
mohon ditindak lanj.
secepatnya.

No. Indeks

Disusun oleh : RR / 9 November 2013

Direviu oleh : S/19 November 2013

Disetujui oleh : IP/ 20 November 2013

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

UAPA	□	MAHKAMAH AGUNG RI (005)
UAPPA-EI	□	BUA (005.01); BADILUM (005.03); BADILAG (005.04); BADIMILTUN (005.05)
UAPPA-W	✓	PT JAMBI (005.01); PN JAMBI (005.03); PTA JAMBI (005.04); PTUN (005.05)
UAKPA	□	

I. PENYELENGGARAAN AKUNTANSI

No	Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR
1.	Dalam menyajikan dasar hukum pada Laporan Keuangan Tahunan yang akan datang perlu memutakhirkan pedoman pelaksanaan APBN menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;	
2.	Dalam penyusunan laporan keuangan agar memperhatikan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;	
3.	Penyampaian Laporan Keuangan dari UAKPA/B ke UAPPA/B-W agar memperhatikan kelengkapan laporan keuangan beserta lampirannya serta memperhatikan ketepatan waktu di dalam penyampaiannya.	
4.	Terdapat satuan kerja yang belum mengirimkan Laporan Keuangan Semester I tahun 2013 DIPA 03 yaitu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	
5.	Dasar hukum penyusutan perlu dimasukkan sebagai dasar perhitungan besaran penyusutan setiap tahunnya.	
6.	Terdapat satuan kerja yang belum menginput Hasil Opname Fisik Persediaan di aplikasi persediaan yang berasal dari DIPA 03 yaitu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Negeri Muara Bulian, Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Bangko, Pengadilan Negeri Muara Bungo, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Negeri Jambi	

II. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

a. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAPPA-W 01 PT JAMBI

No	Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR
1.	Seluruh satker belum membuat estimasi pendapatan kecuali Pengadilan Negeri Muara Bongo,	KKR.01.1